

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Nurul Quartina
NPM : 1405170773
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NURUL QUARTINA
N P M : 1405170773
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI

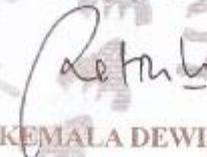
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

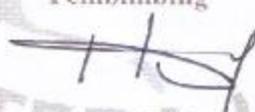
Penguji I


Dra. FATMAWARNI, M.M

Penguji II


PUTRI KEMALA DEWI, S.E., M.Si

Pembimbing

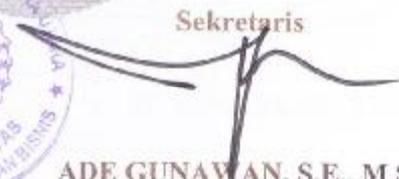

HENDRA HARMAIN, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NURUL QUARTINA
N.P.M : 1405170773
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan sidang skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

HENDRA HARMAIN, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, M.M. M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Quartina

NPM : 1405170773

Jurusan : Ekonomi Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data-data qusioner yang digunakan pada skripsi ini atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh secara langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Apabila suatu saat saya terbukti data yang diambil adalah salah maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

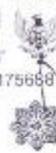
Medan , Maret 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

76D5CAEF3J0175668

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Nurul Quartina

ABSTRAK

NURUL QUARTINA (1405170773), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Populasi yang digunakan adalah SKPD Kota Binjai. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berganda, uji t, dan uji f.

Berdasarkan hasil penelitian Uji t menunjukkan bahwa secara parsial. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara simultan dengan menggunakan Uji F menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan Adjusted R Square sebesar 20,7% nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah sedangkan 79,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, berkah, nikmat, dan melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) Serjana Akuntansi (S.Ak) Jurusan Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka mata hati kita dari kegelapan menuju terang benderang yang penuh dengan rahmat serta dihiasi ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis tercinta, ayahanda **H. Effendi Madya** dan ibunda **Hj Aisah Irianingsih S.Pd.i** yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil selama penulis menjalani pendidikan, serta berkat doa, dorongan dan semangat dari mereka penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, S.E,MM.M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E,M.Si selaku Sekertaris jurusan Program Studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Hendra Harmain, S.E,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Seprida Hanum, S.E,M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu serta memberikan arahan pada setiap kegiatan perkuliahan yang saya lakukan.
8. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kakak tercinta Ria Elsandi S.Pd, Ezza Tri Rizkiana S.E serta abang tercinta Wawan Ferdianyah A.md.Kep.

9. Buat sahabat seperjuangan satu bimbingan yang selalu bersama dan teman-temanku G akuntansi siang serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan semangat Khairina Adriani, Fahrudin, Yuliana butar-butar.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini
12. Seluruh Staff Administrasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari memiliki keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta referensi. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Februari 2018

Penulis

NURUL QUARTINA
1405170773

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Uraian Teoritis	12
2.1.1 Laporan Keuangan Daerah.....	12
2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah.....	13
2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	16
2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Konseptual	21
2.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	21
2.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Daerah	22
2.3.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.....	23
2.4 Hipotesis	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Definisi Operasional.....	27
3.2.1 Variabel Dependen	27
3.2.2 Variabel Independen	28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4 Sampel Dan Populasi.....	31

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.7 Pengujian Hipotesis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Data Penelitian	39
4.1.2 Hasil Uji Validitas	40
4.1.3 Hasil Reliabilitas	41
4.2 Deskripsi Data Secara Statistik	42
4.2.1 Tingkat Responden.....	42
4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).....	43
4.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)	45
4.2.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	47
4.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	48
4.3.1 Uji Normalitas	48
4.3.2 Uji Multikolinearitas	49
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	50
4.4 Analisis Data.....	51
4.4.1 Regresi Linier Berganda	51
4.5 Koefisien Determinasi (R-Square)	53
4.6 Pengujian Hipotesis	53
4.6.1 Uji t.....	53
4.6.2 Uji f.....	54
4.7 Pembahasan	55
4.7.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah	55
4.7.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah	57
4.7.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Opini LKPD Kota Binjai	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel III.1 Tahap Penelitian.....	30
Tabel III.2 Sampel	31
Tabel III.3 Skala Pengukuran Likert	32
Tabel IV.1 Daftar SKPD Kota Binjai	39
Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas.....	40
Tabel IV.3 Hasil Uji Reliabilitas	41
Tabel IV.4 Demografi Responden.....	42
Tabel IV.5 Statistik Deskriptif Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	43
Tabel IV.6 Statistik Deskriptif Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1).....	45
Tabel IV.7 Statistik Deskriptif Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	47
Tabel IV.8 Output VIF.....	50
Tabel IV.9 Hasil Regresi.....	52
Tabel IV.10 Model Summary.....	53
Tabel IV.11 Uji t.....	54
Tabel IV.12 Uji f	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	25
Gambar IV.1 Grafik Normal P-Plot	48
Gambar IV.2 Histogram.....	49
Gambar IV.3 Scatterplot.....	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan penggunaan informasi keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik. Kurangnya pemerintah dalam memberikan informasi keuangan untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan yang belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah.

Permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektifitas, serta penegakan hukum. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas, karena semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan pemerintah masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) yang tertuju kepada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang merupakan unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (LKPD). Berdasarkan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan”. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor (Erlina dan Rasdianto, 2013:21). Perlu disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan laporan keuangan yang disusun sebagai sumber informasi bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan harus disajikan secara wajar bebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan para pengguna, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika informasi yang disajikan valid dan dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkannya. Apabila laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan pelaporan

dan tidak tepat dalam penyampaian maka itu akan berdampak buruk bagi pengguna laporan keuangan (Mahmudin, 2010).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah (PP 71 tahun 2010) antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah. Karakteristik kualitatif informasi dalam rangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, antara lain: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja, tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar

laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah. Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya rakyat.

Namun, permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah nampaknya belum menjadi hal yang umum. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Aksesibilitas (*accessibility*) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan

perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Laporan keuangan daerah berpedoman pada SAKD dan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang bertujuan untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan dapat memberikan opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan IHP semester 1 2017 BPK-RI pada pemeriksaan laporan keuangan daerah yang terjadi di Kota Binjai tahun 2012 sampai 2016

Tabel 1.1
Opini LKPD Kota Binjai

No	Tahun	Opini
1	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: <http://www.bpk.go.id>

Disamping beberapa laporan keuangan instansi pemerintahan yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 revisi dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, masih terdapat beberapa laporan keuangan instansi yang komponen laporannya belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 yaitu, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggung-jawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggung-jawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah

memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap.

Ratna Amalia Safitri (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Himmah Bandariy (2011) yang memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah (1) Penyajian

laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Mulyana (2006) menguji secara empiris apakah penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penyajian neraca daerah maupun aksesibilitas laporan keuangan keduanya berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nur handayani dan Miftahul Reza Fauziyah (2017) pertanggung-jawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasikan masalah:

- 1) Belum semua pemerintah kota binjai menerapkan PP No 71 Tahun 2010.
- 2) Pemerintah kota binjai masih belum mengaksesibilitas laporan keuangan secara luas.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
- 2) Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
- 3) Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Menguji penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Menguji aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- 3) Menguji penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Bagi pemerintah Kota Binjai yaitu sebagai referensi dalam hal penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pelaporan dalam hal ini:

- 1) Aset
- 2) Kewajiban
- 3) Ekuitas
- 4) Pendapatan-LRA
- 5) Belanja
- 6) Transfer

- 7) Pembiayaan
- 8) Saldo anggaran lebih
- 9) Pendapatan-LO
- 10) Beban dan,
- 11) Arus kas

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas
- 6) Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. (Nurmalia dan achmad fauzi, 2017 hal: 47).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai berikut :

- 1) akuntabilitas, mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut (Nordiawan, 2010), tujuan penyajian laporan keuangan terdiri dari menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, dan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
- 2) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- 3) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
- 4) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Diamond, 2002).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD berupa

Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Atas laporan keuangan tersebut, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI melakukan pemeriksaan untuk menilai Laporan Keuangan tersebut dalam hal kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas (accessibility) dalam kamus besar bahasa indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep Pertanggung jawaban publik. Pertanggung jawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan (*accountability* dan *stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Muindro (2008 hal: 21) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik antara lain, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggung jawabkan, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, kepada siapa

pertanggung jawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya. Konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum memadai, maka harus diikuti dengan jiwa *eterpreneurship* pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas.

Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern dilingkungan pemerintahan secara menyeluruh. kegiatan yang mereka lakukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Bandariy (2011)	Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap informasi keuangan pada Banyumas	Hasil dari pengujian hipotesis didalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan oleh para pengguna informasi. Sementara asesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan Secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan
Budi Mulyana (2006)	Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah
Sukhemi (2012)	Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna laporan keuangan daerah mempunyai persepsi bahwa tingkat akuntabilitas suatu laporan keuangan tidak tergantung dari tingkat pengungkapan yang lengkap termasuk informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target termasuk kendalanya, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan lain.

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah Daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mulyana (2006) menyatakan penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama untuk mewujudkan akuntabilitas

adalah dengan penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat menyimpulkan “Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Mulyono (2006) dalam Sukhemi (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Kadarmi (2008) dalam Sukhemi (2012) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan SKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris diatas, maka dapat disimpulkan “Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.”

2.3.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesblitas laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

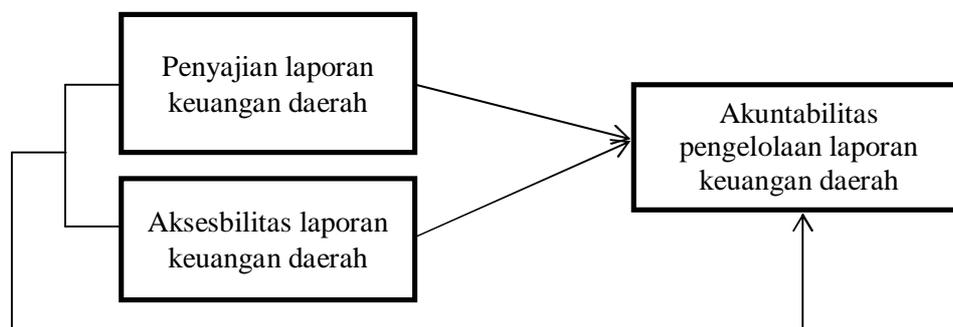
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jones et al (1995) dalam Mulyana (2006), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas,

tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka dapat menyimpulkan “Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.”



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Menurut Juliandi dan Irfan (2013:45) “hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian”. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

- 1) Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, menurut Sugiono (2012 hal 100) “pendekatan asosiatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan variabel yang akan diamati pemecahan masalah. Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Variabel terikat (*Dependent Variabel*)

Menurut Sekaran (2007:116) variabel dependen (Y) adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, variabel ini dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.

1) Akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung

jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum
- b. Akuntabilatas proses
- c. Akuntabilitas program
- d. Akuntabilitas kebijakan

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-Ragu, (2) Tidak Setuju, dan (1) Sangat Tidak Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

3.2.2 Variabel bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain variabel bebas adalah sesuatu yang menjadi sebab akibat terjadinya perubahan nilai pada variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1)

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdapat 4 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-Ragu, (2) Tidak Setuju, dan (1) Sangat Tidak Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

2) Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2)

Aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. Terdapat 3 indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan:

- a. Terbuka dimedia massa
- b. Mudah diakses
- c. Ketersediaan informasi

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-Ragu, (2) Tidak Setuju, dan (1)

Sangat Tidak Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel III.1
Tahap Penelitian

Proses Penelitian	Bulan / Minggu																			
	Nov				Des				Jan				Feb				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Riset		■	■	■																
Pembuatan proposal				■	■	■	■													
Bimbingan Proposal								■	■	■	■	■								
Seminar Proposal													■							
Pengumpulan Data													■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi														■	■	■	■	■		
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2012, hal. 115) populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Binjai.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012 hal 116). Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan, Bendahara pada masing-masing SKPD yang terkait dalam penelitian ini Sampel dapat diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah *non probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Hanya elemen populasi yang memenuhi kriteria tertentu dari penelitian ini yang bisa dijadikan sampel penelitian.

Tabel III.2
Sampel

No	Nama Dinas
1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Dinas Pendidikan
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang

5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6	Dinas Sosial
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Perhubungan
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Perpustakaan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Daftar Pertanyaan (Questioner)

Teknik dan instrument dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket). Kuesioner ini dibagikan kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Dimana jenis skala yang digunakan adalah skala likert.

Table III. 3
Skala Pengukuran Likert

No	Pernyataan	Bobot
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sugiyono (2012) hal 133

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti apakah masing–masing variabel bebas (penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah) tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut sugiono (2012 hal 206) analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam analisis ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau keahlian suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Sugiyono, 2012). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus *Product Momen Pearson* dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

Ghozali (2013) pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah *One Shot*, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka

disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliable (Ghozali 2013).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi, terlebih dahulu penulis melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengelola data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable independen dan variable dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan morla P-P Plot yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka Uji Normalitas data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov- Smirnov (uji K-S). untuk uji K-S yakni jika nilai Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang kurva normalnya itu uji normalitas.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antar variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
- 3) Bila $Tolerance > 0.05$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
- 4) Bila $Tolerance < 0.05$, maka terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan agar mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Bentuk pengujian yang digunakan dengan metode informal atau metode grafik scatterplot.

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik- titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik –titik menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini regresi yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah model persamaan regresi linier dengan variabel bebas lebih dari

satu. Berikut rumus yang akan digunakan dalam menghitung persamaan regresi berganda. Menurut Sugiono (2013:192)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Penyajian Laporan Keuangan

X2 = Penyajian Laporan Keuangan

e = Error

secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsirkan aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

3.6.5 Koefisien Determinasi (R – Square)

Nilai R – square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Determinasi

R^2 = Nilai Korelasi Berganda

3.7 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan atau tidak signifikan. Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan yaitu uji t dan uji F.

3.7.1 Uji t

Uji t digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas secara individual terdapat hubungan yang parsial atau tidak terhadap variabel terikat.

3.7.2 Uji f

Uji F digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman variabel terikat, serta untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki hubungan simultan terhadap variabel terikatnya atau koefisien regresi sama dengan nol.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Penyebaran kuesioner diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan Kepala Keuangan, Staf Keuangan, dan Bendahara.

Tabel IV.1
Daftar SKPD Kota Binjai

No	SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
5	Satuan Polisi Pamong Peraja
6	Dinas Sosial
7	Dinas tenaga Kerja Dan Perindustrian perdagangan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
17	Dinas Perpustakaan
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19	Dinas Pariwisata
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Badan Kepegawaian Daerah
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Badan penanggulangan Bencana daerah
25	Kecamatan dan Kelurahan
26	RSUD Dr.Djoelham Binjai

4.1.2 Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 19 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk degree of freedom ($df = n - 2$) dengan alpha 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2 (45-2) = 43$, sehingga didapat r_{tabel} untuk $df (43) = 0,294$.

Tabel IV.2
Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	R_{tabel}	Hasil
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Pertanyaan 1	0,691	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,807	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,732	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,817	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,690	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,727	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,782	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,843	0,294	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	Pertanyaan 1	0,849	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,741	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,662	0,294	Valid
Akunabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pertanyaan 1	0,372	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,560	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,708	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,559	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,625	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,659	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,673	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,666	0,294	Valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

4.1.3 Reliabilitas

Koefisien reliabilitas instrument dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Perhitungan dilakukan dengan dibantu program SPSS. Adapun hasil reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Variabel Cronbach's alpha	r_{tabel}	Hasil
1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0,783	0,60	Reliabel
2	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)	0,796	0,60	Reliabel
3	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,746	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai cronbach alpha seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0.60. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga data yang dihasilkan dari instrumen pernyataan dalam penelitian ini berkualitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.2 Deskripsi Data Secara Statistik

4.2.1 Tingkat Responden

Tingkat responden merupakan proporsi dari sampel yang melengkapi kuesioner. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diterima dari responden maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.4
Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
a. Laki-laki	20	44,4%
b. Perempuan	25	55,6%
Total	45	100%
Umur:		
a. 20-30 Tahun	14	31,1%
b. 31-40 Tahun	18	40,0%
c. >40 Tahun	13	28,9%
Total	45	100%
Jabatan:		
a. Kepala Keuangan	15	33,3%
b. Staf Keuangan	15	33,3%
c. Bendahara	15	33,3%
Total	45	100%
Pendidikan Terakhir:		
a. SMA	17	37,8%
b. D3	17	37,8%
c. S1	11	24,4%
Total	45	100%

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari karakteristiknya responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai kaum perempuan, yaitu sebanyak 25 responden (55,6%). Dan sisanya pegawai laki-laki sebanyak 20 responden

(44,4%). Dilihat dari karakteristik usia, responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai yang berusia diantara 31-40 yaitu sebanyak 18 pegawai (40,0%), dan diikuti dengan responden yang berusia 20-30 yaitu sebanyak 14 pegawai (31,1%), responden yang berusia diatas 40 tahun sebanyak 13 pegawai (28,9%). Dilihat dari karakteristik jabatan kepala keuangan sebanyak 15 pegawai (33,3%), staf keuangan 15 pegawai (33,3%), bendahara 15 pegawai (33,3%). Dilihat dari karakteristik pendidikan terakhir didominasi oleh tamatan SMA dan D3 sebanyak 17 Pegawai (37,8%), dan diikuti dengan strata-1 11 pegawai (24,4%).

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sebaran data berdasarkan hasil survei kuesioner terhadap 45 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tabel-tabel berikut:

**Tabel IV.5 Statistik Deskriptif
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

No.	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-Ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	20	44,4	24	53,3	1	2,2	0	0	0	0	45	100
2	16	35,6	26	57,8	2	4,4	1	2,2	0	0	45	100
3	15	33,3	26	57,8	4	8,9	0	0	0	0	45	100
4	14	31,1	31	68,9	0	0	0	0	0	0	45	100
5	8	17,8	33	73,3	4	8,9	0	0	0	0	45	100
6	18	40,0	27	60,0	0	0	0	0	0	0	45	100
7	24	53,3	20	44,4	1	2,2	0	0	0	0	45	100
8	18	40,0	25	55,6	2	4,4	0	0	0	0	45	100

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Dari tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sebagian besar menjawab setuju sebesar 53,3%.
- 2) Jawaban responden tentang pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, sebagian besar menjawab setuju sebesar 57,8%.
- 3) Jawaban responden tentang jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir, sebagian besar menjawab setuju sebesar 57,8%.
- 4) Jawaban responden tentang pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagian besar menjawab setuju sebesar 68,9%.
- 5) Jawaban responden tentang pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan, sebagian besar menjawab setuju sebesar 73,3%.
- 6) Jawaban responden tentang laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK, sebagian besar menjawab setuju sebesar 60,0%.
- 7) Jawaban responden tentang laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, sebagian besar menjawab sangat setuju sebesar 53,3%.
- 8) Jawaban responden tentang dilakukannya financial audit terhadap laporan keuangan daerah, sebagian besar menjawab setuju sebesar 55,6%.

4.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Sebaran data berdasarkan hasil survei kuesioner terhadap 45 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang penyajian laporan keuangan daerah pada tabel-tabel berikut:

**Tabel IV.6 Statistik Deskriptif
Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

No.	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-Ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	13	28,9	22	48,9	8	17,8	1	2,2	1	2,2	45	100
2	12	26,7	20	44,4	11	24,2	2	4,4	0	0	45	100
3	13	28,9	20	44,4	12	26,7	0	0	0	0	45	100
4	10	22,2	23	51,1	11	24,4	1	2,2	0	0	45	100
5	11	24,4	23	51,1	10	22,2	1	2,2	0	0	45	100
6	6	13,3	34	75,6	4	8,9	0	0	1	2,2	45	100
7	8	17,8	29	64,4	7	15,6	0	0	1	2,2	45	100
8	11	24,4	23	51,1	9	20,0	1	2,2	1	2,2	45	100

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Dari tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan), sebagian besar menjawab setuju sebesar 48,9%.
- 2) Jawaban responden tentang SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu, sebagian besar menjawab setuju sebesar 44,4%.

- 3) Jawaban responden tentang Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, sebagian besar menjawab setuju sebesar 44,4%.
- 4) Jawaban responden tentang Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh, sebagian besar menjawab setuju sebesar 51,1%.
- 5) Jawaban responden tentang Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, sebagian besar menjawab setuju sebesar 51,1%.
- 6) Jawaban responden tentang Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, sebagian besar menjawab setuju sebesar 75,6%.
- 7) Jawaban responden tentang Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material, sebagian besar menjawab setuju sebesar 64,4%.
- 8) Jawaban responden tentang Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan, sebagian besar menjawab setuju sebesar 51,1%.

4.2.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2)

Sebaran data berdasarkan hasil survei kuesioner terhadap 45 orang responden, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang penyajian laporan keuangan daerah pada tabel-tabel berikut:

**Tabel IV.7 Statistik Deskriptif
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

No. Per	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-Ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	8	17,8	21	46,7	7	15,6	6	13,3	3	6,7	45	100
2	9	20,0	32	71,1	3	6,7	1	2,2	0	0	45	100
3	9	20,0	16	35,6	17	37,8	3	6,7	0	0	45	100

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

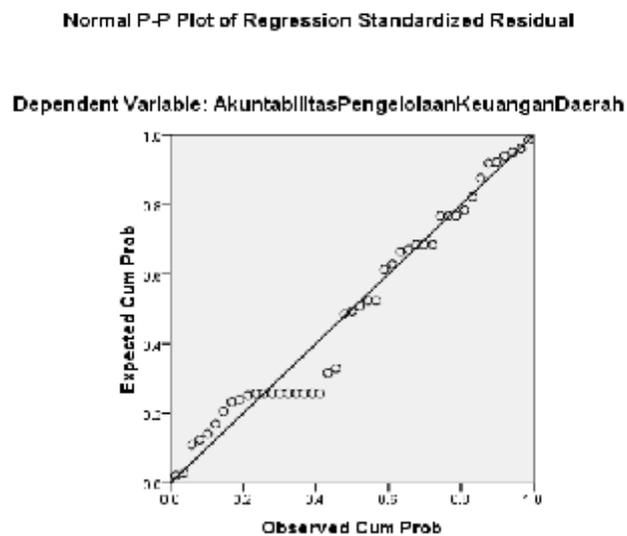
Dari tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden tentang Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, sebagian besar menjawab setuju sebesar 48,9%.
- 2) Jawaban responden tentang Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, sebagian besar menjawab setuju sebesar 71,1%.
- 3) Jawaban responden tentang Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (*website*), sebagian besar menjawab setuju sebesar 35,6%.

4.3 Pengujian Asumsi Klasik

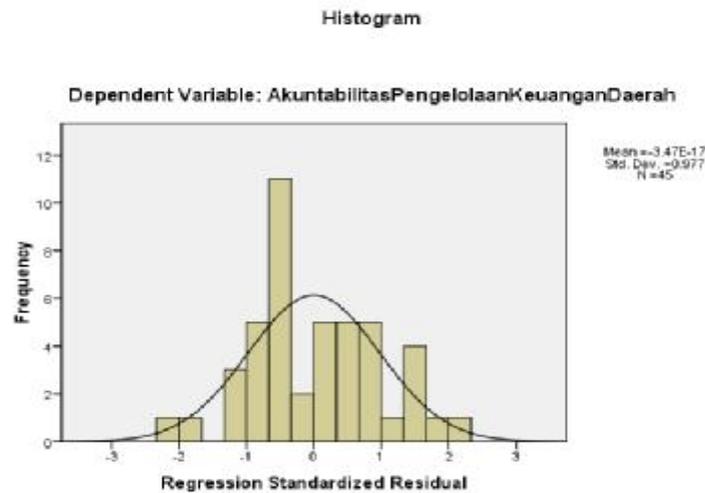
4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas data yaitu dengan menggunakan grafik normal P-Plot dan grafik histogram. Berikut uji normalitas tersebut :



Gambar IV.1
Grafik Normal P-Plot
 Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Dari gambar grafik normal p-plot diatas data menyebar disekitar daerah diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.



Gambar IV.2

Gambar Histogram

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Pada gambar grafik histogram Jika data berdistribusi normal maka data akan membentuk semacam lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Pada gambar grafik histogram diatas menunjukkan distribusi normal yaitu mendekati dan membentuk lonceng maka regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menemukan apakah terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebas dalam model regresi linier. Kriteria yang bagus dalam uji ini adalah tidak terjadinya multikolinearitas. Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian (variance Inflasi Factor/VIF), yang tidak melebihi 4 atau 5. Berikut ini tampilan output nilai tolerance/VIF yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.8
Output VIF
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	25.230	2.577		9.792	.000		
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.182	.088	.326	2.062	.045	.722	1.384
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	.317	.211	.237	1.501	.141	.722	1.384

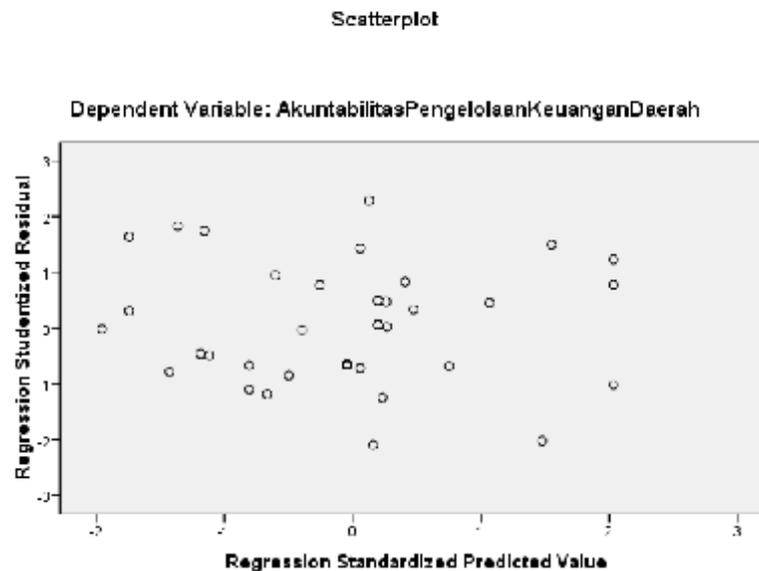
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel indenpenden yakni penyajian laporan keuangan daerah (X1), ksesbilitas laporan keuangan daerah (X2) memiliki nilai VIF 1,384. Dimana kedua variabel independen tersebut memiliki nilai VIF yang tidak melebihi batas 4 atau 5 sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel penelitian ini.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residua dari satu pengamatan ke pengamatan yan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heterokedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar IV.3
Gambar Scatterplot
 Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Pada gambar IV.3 diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas ataupun teratur, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Regresi Linier Berganda

Regresi adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini regresi yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah model persamaan regresi linier dengan variabel bebas lebih dari satu.

Tabel IV.9
Hasil Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.230	2.577		9.792	.000
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.182	.088	.326	2.062	.045
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	.317	.211	.237	1.501	.141

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Dari tabel diatas maka model persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = 25,230 + 0,182X_1 + 0,317X_2 + e$$

- 1) Nilai konstan sebesar 25,230 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 25,230.
- 2) Koefisien penyajian laporan keuangan daerah sebesar 0,182 menunjukan bahwa setiap peningkatan penyajian laporan keuangan daerah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,182satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- 3) Koefisien aksesibilitas laporan keuangan daerah sebesar 0,317 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD sebesar 0,317 dengan asumsi variabel lain konstan.
- 4) Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

4.5 Koefisien Determinasi (R- Square)

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Adapun nilai R-Square yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.10
R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.493 ^a	.243	.207	2.36612

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Dari tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,207 hal ini berarti bahwa 20,7% variasi nilai perusahaan ditentukan oleh variasi nilai penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah sedangkan 79,3% adalah kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Menurut Muhammad Iqbal (2015) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji t

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Untuk menguji apakah penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas

laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel IV.11
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25.230	2.577		9.792	.000
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.182	.088	.326	2.062	.045
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	.317	.211	.237	1.501	.141

a. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki t hitung sebesar 2,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05, maka diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji t pada aksesibilitas laporan keuangan daerah memperoleh nilai signifikan 0,141 (Sig 0,141 > α 0,05) maka ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.6.2 Uji f

Uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, secara bersama-sama

atau serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel IV.12
Uji f
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	75.662	2	37.831	6.757	.003 ^a
Residual	235.138	42	5.599		
Total	310.800	44			

Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah,
Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

Sumber: Pengolahan Data SPSS v.16

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil f hitung sebesar 6,757 dengan signifikan 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dikatakan signifikan karena nilai sig. variabel panyajian laporan keuangan daerah adalah 0,045 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 maka

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009), yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penyajian neraca SKPD berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

Jadi dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik, yang memenuhi karakteristik laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.7.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dikatakan tidak signifikan karena nilai sig. variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah adalah 0,141 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, apabila sig. lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ditolak.

Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan asset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain adalah

memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan daerah. Alasannya adalah apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal.

4.7.3 Pengaruh Penyajian Laporan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil uji simultan atas variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa secara bersamasama memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa dilihat dari nilai sig. 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana dengan nilai sig. yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Steccolini (2002) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan) dapat dipertimbangkan sebagai media akuntabilitas. Dimana pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah (Mardiasmo, 2006). Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. terbukti dan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengujian regresi, diketahui bahwa pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah baik secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mulyana (2006) tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah (studi kasus pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Nasution (2010) tentang pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan SKPD di Pemerintahan propinsi Sumatera Utara

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua tidak ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Hasil pengujian ketiga membuktikan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang baru menurut peraturan PP. No. 71 Tahun 2010.

- 2) Bagi pemerintah daerah agar dapat menyediakan akses yang mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui dan mendapatkannya, terutama bagi para pengguna eksternal. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dibaca dan dipahami. Untuk mendukung akuntabilitas yang efektif tersebut, Pemerintah Daerah Kota Binjai diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya melalui media massa, seperti surat kabar, radio, website, dan media lainnya.
- 3) Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta semua sumber daya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah bisa terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ihsan Dkk. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Citapustaka Media
- Bandariy, Himmah. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Budi Mulyana. 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1. Mei 2006
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kadarmi, T. (2008). *Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*, Skripsi S1. Yogyakarta: FEB UGM
- Katz, Ellen 2004 *Transparency in Government-How American Citizens Influence Public Polity*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muindro, 2008, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media 2008
- Mulyana, B. (2006). *Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2.pp. 65-78.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

- Nurmalia, achmad. 2017, *Akuntansi Pemerintah*, In Melda 2017
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peggy Sande. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Ratna Amalia Safitri. 2009. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah,
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sekaran, (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta

Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin*. September 2002.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Yessi Ramadhani. Dkk 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (studi pada Provinsi Riau)* Vol 1 No 2 Oktober

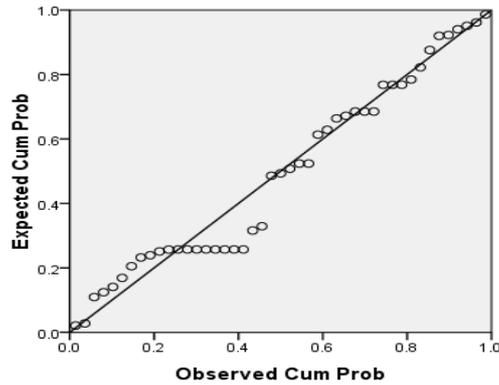
<http://www.bpk.go.id/ihaps>

1. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

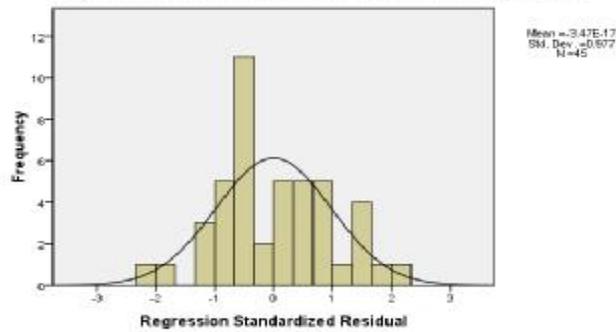
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah



Histogram

Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah



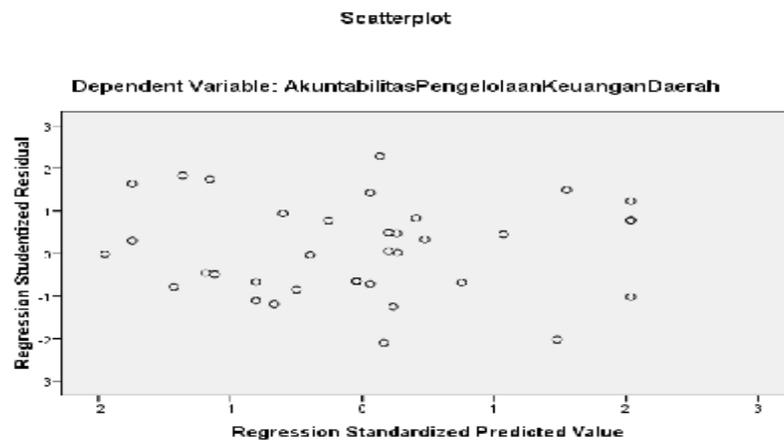
Uji Multikolinearitas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.227	1.877		13.432	.000	
	Pelayanan Rataan Keuangan Daerah	1.02	.077	.726	13.172	.000	.722
	Kecepatan Laporan Keuangan Daerah	2.07	.211	.687	9.812	.001	.722

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Uji Heterokedatisitas



2. Analisis Data

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.230	2.577		9.792	.000
	PenyajianLaporan KeuanganDaerah	.182	.088	.326	2.062	.045
	AksesibilitasLaporan KeuanganDaerah	.317	.211	.237	1.501	.141

a. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

3. Koefisien Determinasi (R-Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.493 ^a	.243	.207	2.36612

a. Predictors: (Constant), AksesibilitasLaporanKeuanganDaerah, PenyajianLaporanKeuanganDaerah

b. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

4. Pengujian Hipotesis

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25.230	2.577		9.792	.000
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.182	.088	.326	2.062	.045
Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	.317	.211	.237	1.501	.141

a. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

Uji f**ANOVA^b**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	75.662	2	37.831	6.757	.003 ^a
Residual	235.138	42	5.599		
Total	310.800	44			

Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDaerah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Nurul Quartina
Tempat dan Tanggal Lahir : Rantau, 10 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jln. Alfalah 3 No. 6, Medan
Anak Ke : 4 Dari 4 Bersaudara
Nama Orang Tua:
Nama Ayah : H.Effendi M
Nama Ibu : Hj. Aisah Irianingsih S.Pd.i
Alamat Orang Tua : Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pauh,
Kec Rantau, Kab Aceh Tamiang

Pendidikan Formal:

- SD Negeri 1 Rantau Pauh (21 Juni 2008)
- SMP Negeri 1 Kuala Simpang (4 Juni 2011)
- SMA Negeri 1 Kejuruan Muda (24 Mei 2014)
- Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara (2014 Sekarang)

Medan , Maret 2018

Nurul Quartina

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Quartina

NPM : 1405170773

Jurusan : Ekonomi Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data-data questioner yang digunakan pada skripsi ini atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh secara langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Apabila suatu saat saya terbukti data yang diambil adalah salah maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan , Maret 2018
Yang membuat pernyataan

Nurul Quartina

KUESIONER

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

BAGIAN PENDAHULUAN

Identitas Responden

No Responden :

Umur :

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Nama SKPD :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Bagian Isi

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda cek list (√) **pada salah satu** pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang diberikan.

Pilihan jawaban :

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

RR : Ragu-Ragu

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	PERNYATAAN	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1
1	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
2	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
3	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir					
4	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
5	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan					
6	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
7	Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
8	Dilakukannya <i>financial audit</i> terhadap laporan keuangan daerah					

Sumber: Peggy Sande 2013

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

No.	PERNYATAAN	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1
1	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).					
2	SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu.					
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
4	Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh					

	pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.					
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material.					
8	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan.					

Sumber: Peggy Sande 2013

AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

No	PERNYATAAN	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa.					
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (<i>website</i>)					

Sumber: Peggy Sande 2013